

ABSTRAK

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

RIDUAN MANIK

N.I.M. : PDIH 031017576
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Ketersediaan pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah, demikian juga halnya Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Akan tetapi kegagalan panen khususnya pertanian sawah, tidaklah dapat dihindari, yang disebabkan oleh faktor alam, baik itu bencana alam maupun perubahan iklim yang ekstrim, serta serangan hama. Hal ini jelas membuat petani menjerit karena mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan asuransi pertanian sebagai wujud dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, justru tidak dapat menjamin kerugian yang dialami oleh petani, sehingga petani padi selalu menanggung sendiri resiko kerugian yang dialami akibat gagal panen tersebut. Penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis nilai keadilan. Yang menjadi permasalahan disini adalah benarkah perlindungan dan pemberdayaan petani saat ini sudah berbasis nilai keadilan, kelemahan-kelemahan apa saja yang timbul dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dalam praktek dilihat dari aspek substansi hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum, serta bagaimana rekonstruksi perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode penelitian hukum normative dan penelitian empiris yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), penelitian lapangan dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada. Bahwa Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saat ini, bila dilihat dari isinya tidak sesuai dengan namanya. Apabila dilihat kelemahan-kelemahan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berlaku saat ini, masyarakat petani tidak akan pernah merasakan apa itu keadilan yang membawa kesejahteraan. Agar Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu, sesuai dengan isi dan namanya, serta nilai keadilan dapat terwujud dirasakan petani, rekonstruksi terhadap Undang-undang tersebut harus dilakukan: identitas lahan agar mengacu kepada rencana tata ruang dan wilayah, pembayaran premi dengan subsidi penuh dari pemerintah, pengawasan dari kegagalan dan keberhasilan petani haruslah lembaga yang independen, serta biaya pertanggung sebagai ganti kerugian yang perlu diatur adalah batas toleransi kerusakan yang tidak dapat ganti rugi.

Kata Kunci: *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Jaminan Hasil Pertanian, Asuransi Pertanian, Asuransi Usaha Tani Padi.*

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS BASED ON JUSTICE VALUE

By

RIDUAN MANIK

N.I.M. : PDIH 031017576
Study Program : Doctoral Program of Law Science

The availability of food as a basic need of the community is the responsibility of the Government, likewise the Government is obliged to prioritize domestic agricultural production to meet national food needs. However, crop failures, especially paddy farming, can not be avoided, caused by natural factors, both natural disasters and extreme climate change, and pest attacks. This clearly makes the farmers scream because of a substantial loss. Meanwhile, the government's efforts to socialize agricultural insurance as a manifestation of agricultural protection and empowerment, in fact, cannot guarantee losses suffered by farmers, so that rice farmers always bear their own risk of losses due to crop failure. This study discusses the reconstruction of protection and empowerment of farmers based on fair value. The problem here is whether the protection and empowerment of farmers is now based on the value of justice, and any weaknesses that arise in the protection and empowerment of farmers in practice viewed from aspects of legal substance, Legal Structure and Legal Culture, and how the reconstruction of protection and empowerment fair value based farmers. The research method used in writing this dissertation is a normative legal research method and empirical research that is by collecting data in library studies, field research and interviews. The data used are primary and secondary data. The secondary data that have been obtained are then analyzed qualitatively, as much as possible using existing materials that are based on the principles, understanding and sources of existing law. Whereas the current Law for the Protection and Empowerment of Farmers, when viewed from its contents does not match its name. If we see the weaknesses of the Farmer Protection and Empowerment Act that are in force today, the farming community will never feel what justice brings to prosperity. In order for the Farmer Protection and Empowerment Act, in accordance with its contents and name, as well as a sense of justice to be realized by farmers, reconstruction of the Act must be carried out: land identity to refer to spatial and territorial plans, payment of premiums with full subsidies from the government, monitoring the failure and success of farmers must be an independent institution, and the cost of insurance as compensation that needs to be regulated is the tolerance limit of damage that cannot be compensated.

Keywords: *Farmer Protection and Empowerment, Agricultural Product Guarantee, Agricultural Insurance, Paddy Farmer Business Insurance.*